



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan tugas pembantuan lain yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Di tetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025
BUPATI SUMBAWA,

SYARIFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 94

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Dinas Perhubungan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang urusan pemerintahan perhubungan. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta isu strategis pembangunan, baik global, nasional, regional maupun lokal. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024), Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa capaian kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta indikator kinerja lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan keunggulan sumberdaya pembangunan, kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diakselerasi melalui optimalisasi pelaksanaan urusan Perhubungan. Dokumen Renstra ini merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan daerah) ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis dan operasional sampai pada uraian kegiatan/subkegiatan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 mencakup pengintegrasian data empiris, evaluasi kinerja, serta analisis mendalam terhadap kondisi umum perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan antara tingkatan pemerintah.

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa ini juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan demikian, Renstra sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, akan terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas itu sendiri, serta terkait pula dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu RPJMD dan RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dalam upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; dan
23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang ada pada urusan perhubungan, baik dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, kegiatan/subkegiatan serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perhubungan, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Konten pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029,

termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 4 (empat) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
2. Terdapat 3 (tiga) Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan.
 - b. Bidang Prasarana.
 - c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 2.1 berikut.

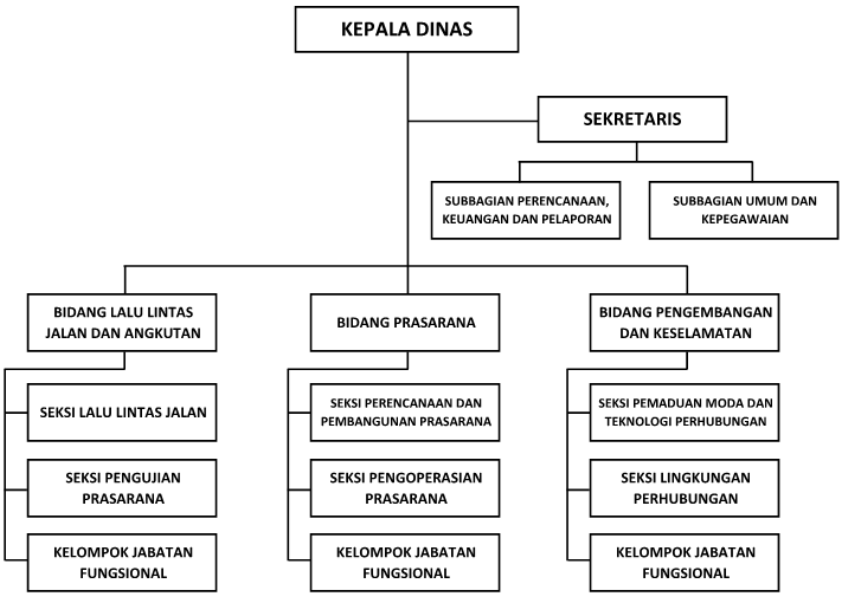
Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah	a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; b. Pelaksanaan administrasi/ penatausahaan Dinas; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)
			dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina transportasi	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Prasarana	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)
			c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honorar). Karakteristik pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 2.2 berikut.

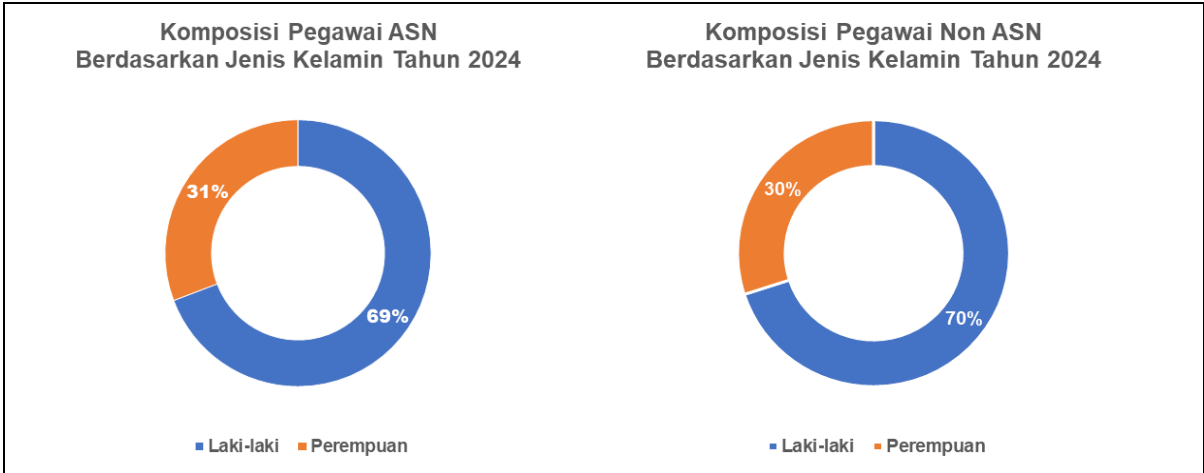
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah ASN	40	48	48	39
2.	Jumlah Pegawai Non ASN	73	73	73	70
3.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:				
	Laki-Laki	29	37	37	27

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
	Perempuan	11	11	11	12
4.	Jumlah Non-ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:				
	Laki-Laki	53	53	53	49
	Perempuan	20	20	20	21
5.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Umur:				
	Usia 25-29 tahun	-	2	2	2
	Usia 30-34 tahun	-	3	3	3
	Usia 35-39 tahun	-	3	3	3
	Usia 40-44 tahun	8	8	8	8
	Usia 45-49 tahun	19	19	19	12
	Usia 50-54 tahun	10	10	9	6
	Usia 55-59 tahun	3	3	4	5

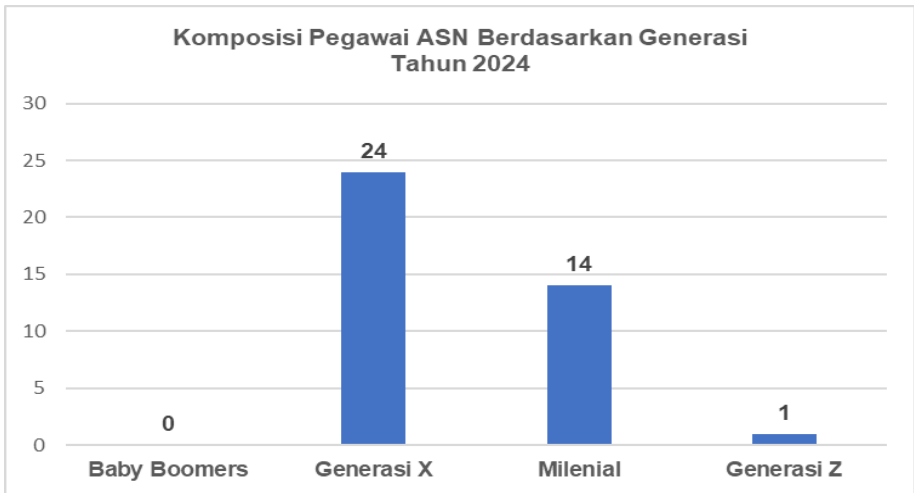
Berdasarkan Tabel 2.2, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 terdiri atas pegawai ASN sebanyak 39 orang (35,78%) dan Non-ASN sebanyak 70 orang (64,22%). Tampak bahwa pegawai non ASN memiliki proporsi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan. Data komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tahun 2024 disajikan pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelaminin Tahun 2024

Dari sisi umur, SDM ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, proporsi terbesar berada pada usia 45-49 tahun sebesar 30,77 persen. Sedangkan usia 40-44 tahun sebesar 20,51 persen, usia 50-54 tahun sebesar 15,38 persen, usia 55-59 tahun sebesar 12,82 persen, usia 35-39 tahun sebesar 7,69 persen, usia 30-34 tahun sebesar 7,69 pesen dan usia 25-29 tahun sebesar 5,13 persen. Menurut level generasi, pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 didominasi oleh generasi X (lahir tahun 1965-1980) sebesar 61,54 persen, sedangkan generasi Milenial (lahir tahun 1980-1996) sebesar 35,90 persen dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) sebesar 2,56 persen. Keadaan tersebut disajikan pada gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Generasi Tahun 2024

Kualifikasi pendidikan ASN (PNS dan PPPK) dan non ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan:	
	SMA Sederajat	8
	Diploma (D1-D3)	5
	S1	24
	S2	2
	S3	0
2.	Jumlah Pegawai No-ASN Berdasarkan Pendidikan:	
	SMA Sederajat	35
	Diploma (D1-D3)	5
	S1	30
	S2	0
	S3	0

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perhubungan, baik ASN maupun non ASN, paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu lebih dari 52 persen, sehingga menjadi sumber daya potensial dalam menggerakkan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kondisi tahun 2024, jumlah pegawai 39 orang ASN (PNS dan PPPK) dengan komposisi S2 sebesar 5,12%, S1 sebesar 61,54%, selanjutnya Diploma sebesar 12,82%, dan SMA sebesar 20,51%. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan juga didukung oleh 70 orang tenaga No-ASN (Honorar) dengan komposisi S1 mencapai 42,86%, selanjutnya Diploma sebesar 7,14% dan SMA sebesar 50%.

Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja bidang pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa per 31 Desember Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Bidang	Jumlah ASN (Orang)	Jumlah Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	13	12	25
2	Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	14	32	46
3	Prasarana	6	19	25
4	Pengembangan dan Keselamatan	6	7	13
Jumlah		39	70	109

Dari Tabel 2.4 diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak berada pada Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

1. Inventaris Tanah

Daftar inventaris tanah sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Tanah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/ Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	10.000,00	2012	Tanah Terminal Utan	Hak Pakai	Terminal	Pembelian
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	3.566,00	1994	Brang Bara	Hak Pakai	Terminal	Pembelian
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	3.174,00	1994	Empang	Hak Pakai	Terminal	Pembelian
4	Tanah Bangunan Terminal Laut	5.000,00	2021	Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas	Hak Pakai		Pembelian
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	105.870,00	1995	Jl. Garuda KM. 6 Kecamatan Labuhan Badas	Hak Pakai	Gedung Kantor	Pembelian

Berdasarkan daftar inventaris Barang Milik Daerah, maka kategori tanah di atas menjadi sumberdaya yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

2. Inventaris Peralatan dan Mesin

Adapun sumberdaya peralatan dan mesin sebagai pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan
Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dump Truck	Mitsubishi Truck / truck	2010	Pembelian
2	Station Wagon	Daihatsu Great New Xenia / X MT 1,3 STD VIN 2018	2019	Pembelian
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	ISUZU / NEW PANTHER TBR 541 LM	2006	Pembelian
4	Pick Up	Isuzu Panther	2009	Pembelian
5	Pick Up	Isuzu Dmex / Dmax	2011	Pembelian
6	Pick Up	Isuzu	2011	Pembelian
7	Pick Up	Isuzu	2011	Pembelian
8	Pick Up	Isuzu	2011	Pembelian
9	Pick Up	Isuzu / NKR71HD E2-2	2012	Pembelian
10	Pick Up	Hilux / Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMDKD	2008	Pembelian
11	Pick Up	Mitsubishi / Strada	2009	Pembelian
12	Pick Up	Mitsubishi Strada / strada	2009	Pembelian
13	Pick Up	Mitsubishi Strada / strada	2009	Pembelian
14	Yeengler/Trailer	Kawasaki / LX150F	2017	Pembelian
15	Sepeda Motor	Yamaha / YT	1998	Pembelian
16	Sepeda Motor	Honda / Bebek	2001	Pembelian
17	Sepeda Motor	Honda/Win / NF 100	2003	Pembelian
18	Sepeda Motor	Honda/Win / NF 100	2003	Pembelian
19	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 D / 125 D	2010	Pembelian
20	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	2012	Pembelian
21	Sepeda Motor	Suzuki EN 125 A / EN 125 D	2006	Pembelian
22	Kapal Motor	Kapal Angkutan Perintis GT 22	2009	Pembelian
23	Kapal Motor	Kapal Angkutan Perintis GT 12,6	2009	Pembelian
24	Kapal Passanger (Kapal Penumpang)	Sumbawa Maritim / Kapal Penumpang	2022	Hibah
25	Mesin Frais	LPE 320 / A3-7,8	2007	Pembelian
26	Mesin Bor Tangan	Maktec / MT 90	2024	Pembelian
27	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Power Tools / 10 pcs	2007	Pembelian
28	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	power tools / 24 pcs	2010	Pembelian
29	Trafo Stater	FORT / kering	2009	Pembelian
30	perkakas bengkel service lainnya (dst)	Takuba / 37 pcs	2007	Pembelian
31	Kunci Pipa	multipro / Puipe Wrench	2007	Pembelian
32	Kunci Pipa	multi pro / Puipe Wrench	2007	Pembelian
33	Kunci Khusus Alat Besar Darat	wipro / otomotif	2011	Pembelian
34	Kunci Pas	Tekiro / Otomotif	2007	Pembelian
35	Global Positioning System	Garmin / E Trex-10	2013	Pembelian
36	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Luica Desto / D-510	2007	Pembelian
37	alat timbangan/biara lainnya (dst)	HPA / jembatan timbang	2007	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	Smoke Tester	Cosber / ECO 2000	2020	Pembelian
39	Rak-Rak Penyimpan	Merk lokal / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2004	Pembelian
40	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Brother / manual portable	2003	Pembelian
41	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Brother / 11-13 Inci	2011	Pembelian
42	Rak Kayu	merk lokal / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2002	Pembelian
43	Rak Kayu	merk lokal / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2004	Pembelian
44	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 laci	2002	Pembelian
45	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 laci	2003	Pembelian
46	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 laci	2003	Pembelian
47	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 laci	2007	Pembelian
48	Brandkas	Nasional / 1 pintu	2004	Pembelian
49	Brandkas	Ichiban / 1 pintu	2004	Pembelian
50	White Board	merk lokal / papan tulis gantung	2004	Pembelian
51	White Board	Mitsubishi / papan tulis gantung	2007	Pembelian
52	Mesin Absensi	Fingerspot / fingerprint	2013	Pembelian
53	Mesin Laminating	LFT-320 / roll	2006	Pembelian
54	Focusing Screen/Layar LCD Projector	G Lite Tripod / 70 ' x 70'	2015	Pembelian
55	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu dilarang parkir	2011	Pembelian
56	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu tempat boleh parkir	2011	Pembelian
57	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu dilarang lewat	2011	Pembelian
58	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu tanda ada masjid	2011	Pembelian
59	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu tempat ada gereja	2011	Pembelian
60	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu hat-hati	2011	Pembelian
61	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu ada zebra cross	2011	Pembelian
62	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu ada tikungan tajam	2011	Pembelian
63	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu ada tanjakan	2011	Pembelian
64	Papan Pengumuman	merk lokal / Rambu ada traffic light	2011	Pembelian
65	Papan Pengumuman	merk lokal / 2 pintu geser	2016	Pembelian
66	Alat Kantor Lainnya	merk lokal / kaca geser	2016	Pembelian
67	Alat Kantor Lainnya	Lokal / Meja rapat	2023	Pembelian
68	Bangku Panjang Besi/Metal	Lokal / AK-C4	2023	Pembelian
69	Meja Resepsionis	Lokal / Meja pelayanan	2023	Pembelian
70	Meja Panjang	merk lokal / panjang	2004	Pembelian
71	Meja 1/2 Biro	lokal / 1/2 biro	2023	Pembelian
72	Kursi Rapat	Fortuner / FN Hitam	2012	Pembelian
73	Kursi Rapat	Napolly	2014	Pembelian
74	Kursi Rapat	Chitose	2019	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	Kursi Tamu	merk lokal / sudut	2002	Pembelian
76	Kursi Tamu	merk lokal / sudut	2004	Pembelian
77	Kursi Putar	Isebel / putar	2005	Pembelian
78	Kursi Lipat	Chitose / Lipat	2023	Pembelian
79	Meja Komputer	olympic / GSC 1091	2007	Pembelian
80	Meja Komputer	Olympic / GSC 1091	2007	Pembelian
81	Sofa	Love / 321	2024	Pembelian
82	Mesin Pemotong Rumput	NLG / TBC-30BP	2022	Pembelian
83	A.C. Window	Nasional / Low Profile	2003	Pembelian
84	A.C. Window	Uchida	2007	Pembelian
85	A.C. Window	Sharp / Low profile	2011	Pembelian
86	A.C. Split	Sharp / 1/2 PK	2021	Pembelian
87	Kipas Angin	Matsunichi & Kirin / Kipas Angin Dinding	2011	Pembelian
88	Televisi	Sharp	2004	Pembelian
89	Sound System	TOA / Spezk ZA 2030	2012	Pembelian
90	Wireless	Asatron / HT-8873 UKM	2020	Pembelian
91	Megaphone	ZR-2015S / 2015S	2016	Pembelian
92	Tangga Aluminium	Lokal / Lipat	2024	Pembelian
93	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Biro	2024	Pembelian
94	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / 1/2 Biro	2003	Pembelian
95	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / 1 Biro	2004	Pembelian
96	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / 1/2 Biro	2004	Pembelian
97	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Galaxy / 1 Biro	2006	Pembelian
98	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / Setengah Biro	2007	Pembelian
99	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Sucitra / Setengah Biro	2008	Pembelian
100	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / Setengah Biro	2008	Pembelian
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Oscar Furniture / Setengah Biro	2010	Pembelian
102	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / 1 Biro	2011	Pembelian
103	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / 1/2 Biro	2011	Pembelian
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Kayu Jati / Setengah Biro	2014	Pembelian
105	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	merk lokal / setengah biro	2007	Pembelian
106	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Lokal / Meja Rapat	2023	Pembelian
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	merk lokal / putar	2011	Pembelian
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	we file / B-011	2019	Pembelian
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	We File / B-011	2019	Pembelian
110	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Isable / putar	2014	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
111	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Polaris / Lipat	2013	Pembelian
112	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	merk lokal / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2001	Pembelian
113	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	merk lokal / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2011	Pembelian
114	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Sucitra / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2013	Pembelian
115	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	merk lokal / 2 Pintu Atas dan 2 Pintu Bawah	2013	Pembelian
116	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Emporium / 2 pintu	2019	Pembelian
117	Camera Electronic	Canon DSC H300 / DSC H300	2016	Pembelian
118	Rambu/Bak Ukur	merk lokal / Kiwa Lite ASTM Type I	2011	Pembelian
119	Rambu/Bak Ukur	merk lokal / Kiwa Lite ASTM Type I	2011	Pembelian
120	Rambu/Bak Ukur	merk lokal	2011	Pembelian
121	Rambu/Bak Ukur	merk lokal / Kiwa Lite ASTM Type I	2011	Pembelian
122	Rambu/Bak Ukur	merk lokal	2011	Pembelian
123	Rambu/Bak Ukur	merk lokal / Kiwa Lite ASTM Type I	2011	Pembelian
124	Handy Talky (HT)	Redel / DL-5108	2024	Pembelian
125	Facsimile	HP / KX-FT 903	2011	Pembelian
126	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	X-Bass / mobile	2013	Pembelian
127	Unit Pemancar VHF/FM Portable	Transmitter / portable	2009	Pembelian
128	peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	Transmitter / portable	2008	Pembelian
129	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Winner Set / portable	2004	Pembelian
130	Audio/Vidio Communication	Vitron / portabel	2004	Pembelian
131	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	wordpress / 12 Canel	2009	Pembelian
132	Alat Uji Gas Buang	Cosber / KWQ-4/5M	2021	Pembelian
133	Rotator	red tec / TBD 2000	2011	Pembelian
134	Distiling Apparatus	LG / 14 Inci	2015	Pembelian
135	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	Halex 7/8 / 7/8	2010	Pembelian
136	Thermometer Badan	CEM / IR-805	2020	Pembelian
137	P.C Unit	ACER	2011	Pembelian
138	P.C Unit	HP / 2 in 1	2017	Pembelian
139	P.C Unit	HP / 2 in 1	2021	Pembelian
140	P.C Unit	Lenovo / 17 In	2021	Pembelian
141	Lap Top	Lenovo / IDEAPAD-310	2017	Pembelian
142	Lap Top	Dell	2017	Pembelian
143	Lap Top	Dell / 14 Inci	2017	Pembelian
144	Lap Top	Lenovo / AMD-A6	2019	Pembelian
145	Lap Top	Lenovo / AMD-A6	2020	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
146	Lap Top	ACER / Travelmate TMP214 54 15 1235U, 8GB, 512GB, SSD	2023	Pembelian
147	Lap Top	AXIOO / Ram 4 GB, Hardisk 500GB, VGA Intel UHD	2023	Pembelian
148	Lap Top	ASUS / Ram 4GB, Hardisk 500GB, VGA Intel UHD	2023	Pembelian
149	Lap Top	ASUS / Processor corel3, Ram 4 GB, Memori 25 GB	2024	Pembelian
150	Note Book	Toshiba	2013	Pembelian
151	Note Book	Toshiba / NB520-1024	2013	Pembelian
152	Note Book	Lenovo / 14 Inci	2015	Pembelian
153	Tablet PC	HP / 2 in 1	2021	Pembelian
154	Card Reader (Peralatan Mainframe)	Epson / 3 in 1	2021	Pembelian
155	CPU (Peralatan Mainframe)	LG / E 5700 3.00 GHz	2011	Pembelian
156	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Kingma / 3 in 1	2021	Pembelian
157	Monitor	LG / Flatron W1953SE	2010	Pembelian
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma IP 2770 / IP 2770	2013	Pembelian
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Omnikey 5422 / 5422	2019	Pembelian
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma MP 237 / MP-237	2013	Pembelian
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2770	2015	Pembelian
162	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2770	2017	Pembelian
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / 3 In 1	2021	Pembelian
164	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / 3 In 1	2021	Pembelian
165	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pointman	2021	Pembelian
166	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / 3 In 1	2021	Pembelian
167	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma IP 2770	2013	Pembelian
168	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / 3 In 1	2022	Pembelian
169	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 3210	2023	Pembelian
170	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 3210	2023	Pembelian
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 3210	2023	Pembelian
172	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3250	2024	Pembelian
173	Traffic Light	merk lokal / ASP SMP EL02	2007	Pembelian
174	Traffic Light	merk lokal / ASP SMP EL02	2007	Pembelian
175	rambu bersuar lainnya (dst)	merk lokal / warning light	2019	Pembelian
176	Rambu Jalan	merk lokal / Warning light	2007	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
177	Rambu Jalan	merk lokal / Warning light	2009	Pembelian
178	Rambu Jalan	merk lokal / Warning light	2017	Pembelian
179	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu larangan masuk khusus truck & bus	2020	Pembelian
180	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu penyeberangan	2020	Pembelian
181	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tempat penyeberangan	2020	Pembelian
182	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu lampu lalu lintas	2020	Pembelian
183	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang belok kanan	2020	Pembelian
184	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu lampu lalu lintas	2020	Pembelian
185	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu larangan masuk khusus truck & bus	2020	Pembelian
186	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu larangan masuk khusus truck & bus	2020	Pembelian
187	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang belok kiri	2020	Pembelian
188	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tempat penyeberangan	2020	Pembelian
189	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu rumah sakit	2020	Pembelian
190	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tempat penyeberangan	2020	Pembelian
191	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu hati-hati	2020	Pembelian
192	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang empat	2020	Pembelian
193	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ke kanan	2020	Pembelian
194	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang empat	2020	Pembelian
195	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu hati-hati	2020	Pembelian
196	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu turunan curam	2020	Pembelian
197	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu jembatan sempit	2020	Pembelian
198	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan terjal	2020	Pembelian
199	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu hati-hati	2020	Pembelian
200	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu turunan curam	2020	Pembelian
201	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu jembatan sempit	2020	Pembelian
202	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu banyak tikungan	2020	Pembelian
203	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
204	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan	2020	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
205	Rambu Jalan	merk lokal / rambu turunan	2020	Pembelian
206	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
207	Rambu Jalan	merk lokal / rambu turunan	2020	Pembelian
208	Rambu Jalan	merk lokal / rambu tanjakan	2020	Pembelian
209	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga sisi kanan	2020	Pembelian
210	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga sisi kiri	2020	Pembelian
211	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
212	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu banyak tikungan	2020	Pembelian
213	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
214	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ganda	2020	Pembelian
215	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang empat	2020	Pembelian
216	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang masuk berat lebih 5 ton	2020	Pembelian
217	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga sisi kanan	2020	Pembelian
218	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
219	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu banyak tikungan	2020	Pembelian
220	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga sisi kiri	2020	Pembelian
221	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan terjal	2020	Pembelian
222	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ganda	2020	Pembelian
223	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga sisi kiri	2020	Pembelian
224	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu turunan curam	2020	Pembelian
225	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga sisi kanan	2020	Pembelian
226	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
227	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga serong kiri	2020	Pembelian
228	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
229	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu banyak tikungan	2020	Pembelian
230	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang mendahului	2020	Pembelian
231	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu hati-hati	2020	Pembelian
232	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang empat	2020	Pembelian

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
233	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan terjal	2020	Pembelian
234	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu turunan curam	2020	Pembelian
235	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu persimpangan tiga type Y	2020	Pembelian
236	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga Y	2020	Pembelian
237	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu turunan	2020	Pembelian
238	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan	2020	Pembelian
239	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ganda	2020	Pembelian
240	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ke kiri	2020	Pembelian
241	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ke kanan	2020	Pembelian
242	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu turunan curam	2020	Pembelian
243	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan terjal	2020	Pembelian
244	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ke kanan	2020	Pembelian
245	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tikungan ke kiri	2020	Pembelian
246	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu lintasan pesawat	2020	Pembelian
247	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu banyak tikungan	2020	Pembelian
248	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu tanjakan	2020	Pembelian
249	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga T	2020	Pembelian
250	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu dilarang belok kanan	2020	Pembelian
251	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu penyempitan kiri	2021	Pembelian
252	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga Y	2020	Pembelian
253	Rambu Jalan	Lokal / Rambu tempat penyeberangan dpn rmh dinas kapolres	2023	Hibah
254	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu simpang tiga Y	2020	Pembelian
255	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
256	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
257	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
258	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
259	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
260	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
261	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
262	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
263	Rambu Jalan	Lokal / Rambu dilarang parkir	2023	Hibah
264	Rambu Jalan	Lokal / Rambu hati-hati	2023	Hibah

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun	Asal Usul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265	Rambu Jalan	Lokal / Rambu tempat penyeberangan	2023	Hibah
266	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
267	Rambu Jalan	merk lokal / Rambu lampu lalu lintas	2020	Pembelian
268	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
269	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
270	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
271	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
272	Rambu Jalan	Lokal / type 1	2023	Pembelian
273	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
274	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
275	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
276	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
277	Rambu Jalan	Lokal / Type 1	2023	Pembelian
278	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
279	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
280	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
281	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
282	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
283	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
284	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
285	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
286	Rambu Jalan	Lokal / Penunjuk arah	2024	Pembelian
287	Rambu Papan Tambahan	merk lokal / warning light	2007	Pembelian
288	Rambu Papan Tambahan	merk lokal / warning light	2016	Pembelian
289	Rambu Cermin	Lokal / Cermin cembung	2024	Pembelian
290	Rambu Cermin	Lokal / Cermin cembung	2024	Pembelian
291	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	merk lokal / warning light	2015	Pembelian
292	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	Tanaga / Stackable	2023	Pembelian
293	Run Way Traffic Light	merk lokal / warning light	2016	Pembelian
294	Run Way Traffic Light	merk lokal / warning light	2015	Pembelian

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Tahun 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,87	0,87	0,87	0,90
2.	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	BB	BB	BB	B

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio Konektivitas Kabupaten menunjukkan keterhubungan wilayah dalam satu kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah angkutan jalan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan berbanding kebutuhan trayek dan kebutuhan lintas penyeberangan, dengan formulasi sebagai berikut:

Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai,danau dan penyeberangan).

Keterangan :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut.
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut.

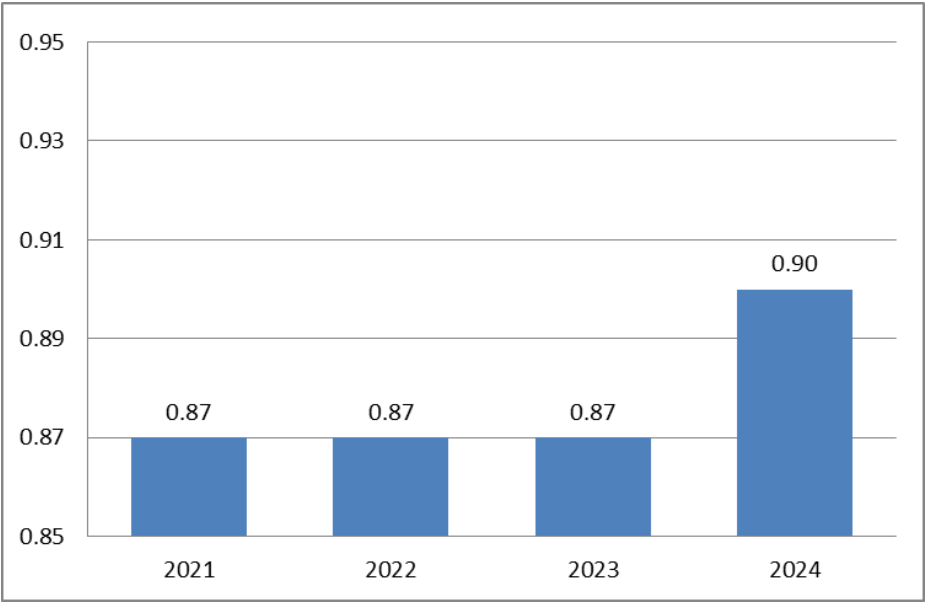
Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

- a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
- b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 50, bobot angkutan jalan = 50)
- c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)
- d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas:

- a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, rasio konektivitas kabupaten tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 2.4 berikut.

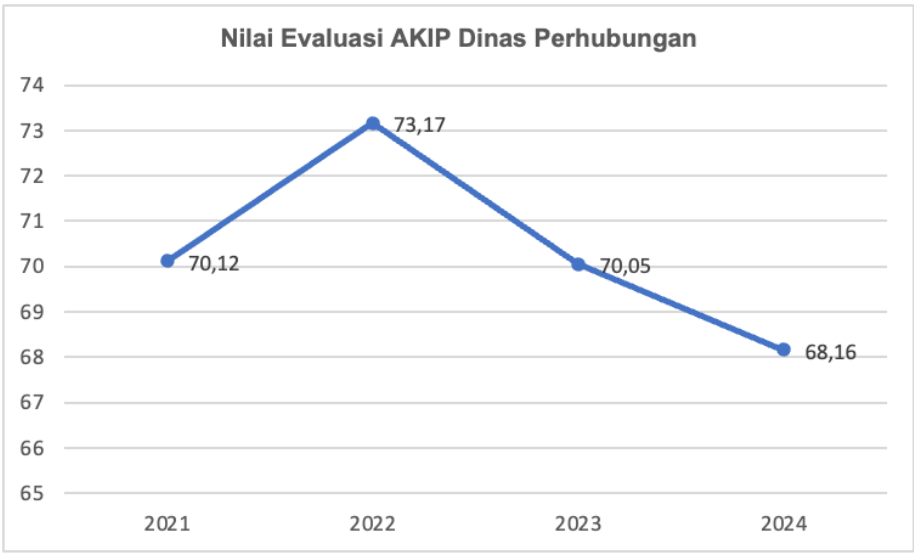


Gambar 2.4 Grafik Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2024

Rasio konektivitas kabupaten menunjukkan tren yang stabil dalam tiga tahun terakhir sebelum mengalami peningkatan pada tahun 2024. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023, rasio konektivitas kabupaten tercatat tetap di angka 87,1%, hal ini mencerminkan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas yang relatif stagnan. Namun pada tahun 2024, rasio konektivitas kabupaten meningkat menjadi 90,3%, kenaikan ini dikarenakan layanan lintas penyeberangan Kabupaten Sumbawa tahun 2021, 2022 dan 2023 kurang dari 5 kali dalam satu minggu (frekuensi sedang dengan bobot 0,8) sedangkan tahun 2024 layanan lintas penyeberangan terlayani setiap hari atau lebih dari 5 kali dalam satu minggu (frekuensi tinggi dengan bobot 1) sehingga terjadi kenaikan bobot pada IK2 dari 0,8 menjadi 1. Kenaikan ini mengindikasikan efektivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan keterhubungan wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat secara lebih efisien.

2. Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

Berdasarkan gambar 2.5 dapat dilihat bahwa capaian nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai AKIP berada pada angka 70,12 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 73,17, mencerminkan upaya peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program secara akuntabel. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 70,05 dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan capaian 68,16. Penurunan ini menjadi perhatian serius, sehingga ke depan diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan kinerja agar prinsip akuntabilitas dapat terus ditingkatkan secara konsisten.

2.1.3.2. Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (urusan perhubungan) Tahun 2021-2024, disajikan pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Rasio	0,8	0,05	0,2	0,21

Capaian nilai V/C Ratio pada jalan kabupaten di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan kondisi lalu lintas yang relatif masih lancar. Pada tahun 2021, V/C Ratio tercatat sebesar 0,8, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 0,05, yang disebabkan oleh cakupan survei yang lebih banyak dilakukan pada ruas-ruas jalan perdesaan dengan volume lalu lintas yang sangat rendah. Tren peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing 0,2 dan 0,21. Secara umum, nilai V/C Ratio pada jalan kabupaten di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tingkat pelayanan jalan yang masih baik.

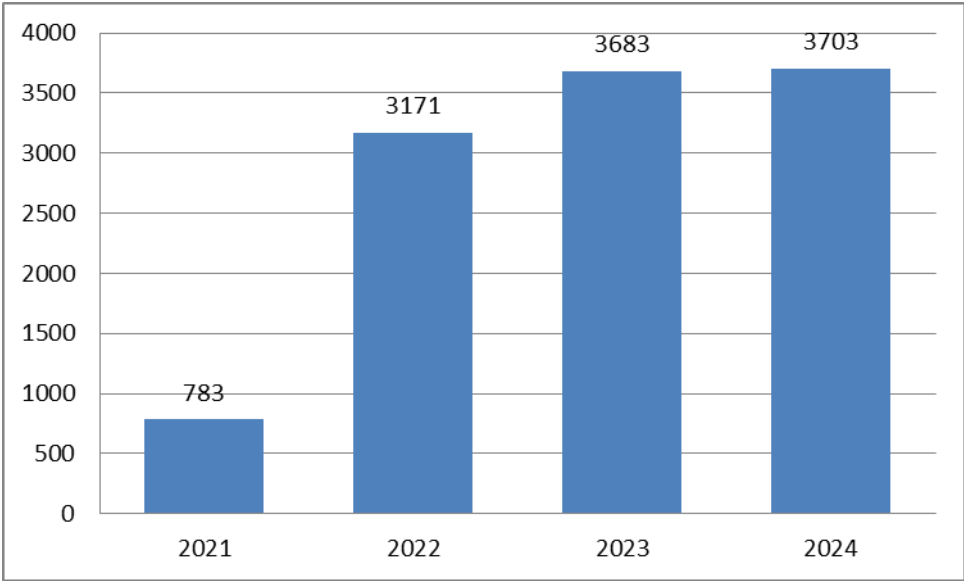
2.1.3.3. Indikator Lainnya

Capaian indikator urusan pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024, disajikan berikut ini.

1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk menjamin keselamatan kendaraan bermotor secara teknis di jalan melalui penentuan kelaikan jalan kendaraan bermotor, ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan mengontrol emisi gas buang kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan publik. Berdasrkan data base Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2021, jumlah uji KIR kendaraan umum di kabupaten Sumbawa 783 unit kendaraan, rendahnya jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas dan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi menghambat operasional layanan uji KIR, menyebabkan banyak kendaraan tidak dapat melakukan pemeriksaan uji berkala sesuai jadwal. Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi dan berkurangnya jumlah kendaraan operasional juga berkontribusi terhadap rendahnya jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan 304.98% dari tahun 2021 dengan jumlah kendaraan yang lulus uji KIR 3171 unit kendaraan, tahun 2023 jumlah uji KIR kendaraan mengalami kenaikan 16.14% dari tahun 2022 dengan jumlah 3683 unit, tahun 2024 mengalami

kenaikan 0.65% dari tahun 2023 dengan jumlah kendaraan yang lulus uji KIR tahun 2024 3703 unit. Grafik jumlah uji KIR tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6 Grafik Jumlah Uji KIR angkutan umum tahun 2021-2024

2. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal Bis

a. Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut yang dioperasikan di kabupaten Sumbawa adalah Pelabuhan Badas terletak di Kecamatan Labuhan Badas, ± 15 Km dari pusat kota Sumbawa Besar. Pelabuhan Badas dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia III dan otoritas kesyahbandaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas ditetapkan dalam kategori Kelas V dan di pimpin oleh seorang Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan tugas pokok : “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan”. Dari segi Operasional, Pelabuhan Badas merupakan pintu gerbang utama perekonomian pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikunjungi oleh kapal-kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Nusantara untuk muatan antar Pulau dan pelayaran khusus (suplay stok BBM Pertamina).

b. Dermaga/Tambatan Perahu

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga Rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil dan terisolasi. Ketersediaan dermaga/tambatan perahu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9 Ketersediaan dermaga/tambatan perahun tahun 2021-2024

URAIAN	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pelabuhan Pengumpan Lokal	10	10	10	10
- Pelabuhan Pengumpul	1	1	1	1

c. Terminal Bus

Sebagai konsekuensi dari perkembangan angkutan umum dan pelayanan pada jaringan trayek, diperlukan penentuan simpul yang merupakan tempat bagi pergantian antarmoda dan intermoda berupa Terminal. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal dilengkapi dengan fasilitas utama, dan fasilitas penunjang. Dengan demikian lokasi Terminal berada pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketersediaan Terminal penumpang angkutan jalan tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 disajikan 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Jumlah Terminal Penumpang Angkutan Jalan

URAIAN	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Type A	1	1	1	1
- Type C	1	1	1	1
- Shelter	-	-	-	-

3. Persentase Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan. Larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang tahun 2021 sebanyak 21 buah. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang tahun 2022 sebanyak 0 buah tidak sesuai target yang ditetapkan karena kebutuhan tersebut tidak dialokasikan pada tahun 2022, untuk tahun 2023 sebanyak 49 buah. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang tahun 2024 sebanyak 10 buah.

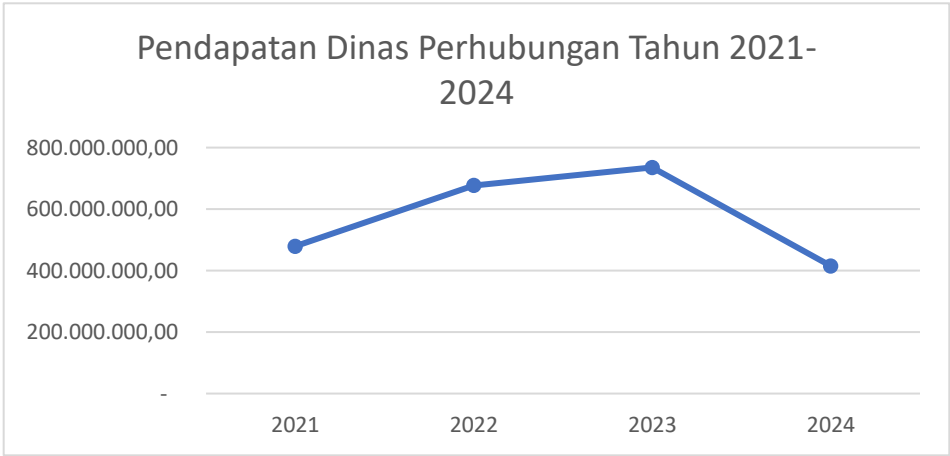
4. Realisasi Pendapatan 2021-2024

Target dan realisasi pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 seperti disajikan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Target dan realisasi pendapatan tahun 2021-2024

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	535.800.000,00	1.289.500.000,00	858.120.000,00	288.100.000,00	1.331.351.628,00	479.067.094,00	676.530.800,00	735.022.060,00	414.860.000,00	-	0,89	0,52	0,86	1,44	0,00
Retribusi Daerah	535.800.000,00	1.289.500.000,00	858.120.000,00	288.100.000,00	1.331.351.628,00	479.067.094,00	676.530.800,00	735.022.060,00	414.860.000,00	-	0,89	0,52	0,86	1,44	0,00
Retribusi Jasa Umum	375.000.000,00	675.000.000,00	700.000.000,00	275.000.000,00	718.318.300,00	325.940.700,00	554.177.840,00	686.879.060,00	401.010.000,00	-	0,87	0,82	0,98	1,46	0,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	256.542.250,00	237.135.000,00	240.924.000,00	325.900.000,00	401.010.000,00	-	1,05	0,96	1,30	1,46	0,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	425.000.000,00	450.000.000,00	-	461.776.050,00	88.805.700,00	313.253.840,00	360.979.060,00	-	-	0,59	0,74	0,80	-	0,00
Retribusi Jasa usaha	160.800.000,00	614.500.000,00	158.120.000,00	13.100.000,00	613.033.328,00	153.126.394,00	122.352.960,00	48.143.000,00	13.850.000,00	-	0,95	0,20	0,30	1,06	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	615.701,00	300.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00	-	0,25	0,25	1,08	1,08	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	17.100.000,00	9.600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	923.521,00	9.727.000,00	6.129.000,00	7.650.000,00	9.900.000,00	-	0,57	0,64	0,85	1,10	0,00
Retribusi tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	600.800.000,00	145.020.000,00	-	607.902.515,00	109.652.800,00	110.050.000,00	36.478.000,00	-	-	0,91	0,18	0,25	-	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	22.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.591.591,00	33.446.594,00	6.023.960,00	3.365.000,00	3.300.000,00	-	1,49	1,72	0,96	0,94	0,00

Secara umum baik target maupun realisasi anggran pendapatan selama periode tersebut mengalami pasang surut. Tren peningkatan realisasi PAD Tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 2.7 berikut:



Gambar 2.7 Grafik Realisasi PAD Tahun 2021-2024

Kondisi capaian Tahun 2021 :

- Secara global PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk Tahun 2021 tidak mencapai target. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar Rp 535.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 479.067.094,- atau 89,41%.
- Target Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 325.940.700,- atau 86,92%. Hal tersebut disebabkan karena retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor belum mencapai target atau hanya terealisasi 59,20% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk retribusi penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum terealisasi 105,39% dari target yang ditetapkan
- Target Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan sebesar Rp 160.800.000,- terealisasi sebesar Rp 153.126.394,- atau 95,23%. Retribusi pemakaian ruangan terealisasi 25%, retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum terealisasi 56,88%, retribusi tempat khusus parkir terealisasi 91,38%, retribusi pelayanan kepelabuhanan terealisasi 148,65%.

Kondisi capaian Tahun 2022:

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.289.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 676.530.800,- atau sebesar 52,46% dari target yang ditetapkan. Target pendapatan atau retribusi pada tahun 2022 tidak mencapai target karena beberapa retribusi di tahun 2022 tidak mencapai target seperti Retribusi tempat khusus parkir salah satunya retribusi parkir pasar seketeng hanya terealisasi 4,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,-.
- Target retribusi jasa umum tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 675.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 82,10% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 554.177.840,- dengan rincian realisasi retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 96,37% dari target atau sebesar Rp. 240.924.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 73,71% dari target atau sebesar Rp. 313.253.840,-.
- Target retribusi jasa usaha tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 614.500.000,- terdiri dari retribusi pemakaian ruangan (MCK), retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi pemakaian ruangan (MCK) sebesar 25% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 150.000,- realisasi retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebesar 63,84% dari target atau sebesar Rp. 6.129.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 18,32% atau sebesar Rp. 110.050.000, dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 172,11% dari target atau sebesar Rp. 6.023.960.

Kondisi capaian Tahun 2023 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 858.120.000,- realisasinya sebesar Rp. 735.022.060,- atau sebesar 85,65% dari target yang ditetapkan.
- Target retribusi jasa umum tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 700.000.000,- terdiri dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 98,13% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 686.879.060,- dengan rincian realisasi retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 130,36% dari target atau sebesar Rp. 325,900.000.- dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 80,22% dari target atau sebesar Rp. 360.979.060.
- Target retribusi jasa usaha tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 158.120.000,- terdiri dari retribusi pemakaian ruangan (MCK), retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 30,45% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 48.143.000,- dengan rincian realisasi retribusi pemakaian ruangan (MCK) sebesar 108,33% dari target atau sebesar Rp. 650.000,- realisasi retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebesar 85%% dari target

atau sebesar Rp. 7.650.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 25,15% atau sebesar Rp. 36.478.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 96,14% dari target atau sebesar Rp. 3.365.000,-. Rendahnya realisasi retribusi tempat khusus parkir dikarenakan retribusi parkir pasar tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan dan dialihkan untuk dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mulai bulan Maret 2023.

Kondisi capaian Tahun 2024 :

- Target retribusi jasa umum tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 275.000.000,- target retribusi jasa umum turun dari tahun sebelumnya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didapati bahwa pengujian kendaraan bermotor tidak lagi menjadi objek retribusi sehingga retribusi jasa umum pada Dinas Perhubungan hanya retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 145,82% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 401.010.000.
- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usaha tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 13.100.000,- terdiri dari retribusi pemakaian ruangan (MCK), retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 105,73% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 13.850.000,- dengan rincian realisasi retribusi pemakaian ruangan (MCK) sebesar 108,33% dari target atau sebesar Rp. 650.000,- realisasi retribusi retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebesar 110% dari target atau sebesar Rp. 9.900.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 94,29% dari target atau sebesar Rp. 3.300.000,-.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa meliputi:

1. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan dan penumpang angkutan umum.
2. Pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor.
3. Penyelenggara dan pengusaha angkutan umum.
4. Pengelola dan pengguna fasilitas parkir.
5. Pengguna jasa penyeberangan dan angkutan perairan.
6. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya menjalankan amanah memberikan pelayanan, khususnya dalam hal terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Namun, di saat yang bersamaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa juga dituntut harus bisa melihat potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah yang akan dihadapi.

Permasalahan daerah yang terinci dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan beririsan dengan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.
2. Pengelolaan perhubungan/transportasi belum optimal antara lain: kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih terjadi, frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan yang terbatas.

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan Bidang Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Infrastruktur perhubungan masih terbatas	1	Sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan	1	Minat pengusaha angkutan untuk mengisi trayek yang belum terlayani masih rendah
				2	Pelayanan angkutan perintis masih terbatas
				3	Belum terlaksananya pembangunan terminal dan pelabuhan pada lokasi yang teridentifikasi sebagai simpul transportasi
2	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal	1	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	1	Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal
				2	Sarana prasarana perangkat daerah masih kurang. Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis atau kondisi aktual sebagai arus utama perangkat daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, baik berupa isu global, nasional dan regional. Kondisi tersebut disajikan pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Isu Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Kabupaten Sumbawa

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan <i>good governance</i> Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, misalnya <i>Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators (WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index</i>).	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan : Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan publik. Desain organisasi perangkat daerah masih asimetris/ belum bersifat afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal
Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Perhubungan/transportasi belum optimal	Degradasi Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Rawan Bencana → Perubahan tata guna lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim meningkatkan risiko bencana lingkungan.	Perubahan Iklim dan Bencana Alam yang Meningkat: Perubahan iklim terus menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti kebakaran hutan, banjir dan badai. Dampak ini mengancam keanekaragaman hayati, ketahanan pangan dan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Upaya global untuk mengurangi emisi gas	Konektivitas dan Infrastruktur Transportasi : Pengembangan sistem transportasi multimoda, optimalisasi kawasan industri dan ekonomi khusus, serta perluasan jalan tol dan jalur kereta.	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah: Penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi publik, serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi.	1. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Belum Optimal 2. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan belum optimal

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan menjadi semakin mendesak.			

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Kualitas pengelolaan kinerja dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.
2. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Belum Optimal.
3. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan belum optimal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Merujuk pada petunjuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, bahwa sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara *inline* (terkait langsung) menjadi tujuan dari Perangkat Daerah. Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah “*Meningkatnya konektivitas infrastruktur kewilayahan*”. Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029, dengan fokus utama optimalisasi pengelolaan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NSPK: penyelenggaraan transportasi yang bertujuan menjamin kelancaran, keselamatan, keterjangkauan, dan konektivitas pergerakan orang dan barang antar wilayah melalui berbagai moda secara terpadu.	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai,danau dan penyeberangan). Keterangan : • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut. • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 50, bobot angkutan jalan = 50) c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan
2	Sasaran RPJMD yang relevan: Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah			

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut.
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan.

Secara rinci target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah		Indikator Tujuan: Rasio konektivitas		
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Indikator Sasaran 1.1: Persentase ketersediaan prasarana transportasi darat	%	Jumlah prasarana transportasi darat yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan prasarana transportasi darat dikali seratus
		Indikator Sasaran 1.2: Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	Jumlah prasarana transportasi laut yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan prasarana transportasi laut dikali seratus
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	Indikator Sasaran 2.1: Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori evaluasi AKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.
		Indikator Sasaran 2.2: Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	Kategori IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
		Indikator Sasaran 2.3: Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	Laju PAD: ((PAD tahun n – PAD tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali seratus. Keterangan: • PAD tahun n = total PAD yang diperoleh dari sektor perhubungan pada tahun berjalan • PAD tahun n-1 = total PAD yang diperoleh dari sektor perhubungan pada tahun sebelumnya

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

TU JU AN PD	SASARAN PD		INDIKATOR	SAT UAN	BASELI NE KINERJ A 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah		1 Rasio Konektivitas	Poin	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
	1	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	1 Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	%	19,72	20,24	35	50	65	80	100
			2 Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	83	83	83	92	92	100	100
	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	1 Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	B	BB	BB	BB	A	A	A

TU JU AN PD	SASARAN PD		INDIKATOR	SAT UAN	BASELI NE KINERJ A 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			2	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
			3	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	-43.56	5	5	5	5	5

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ketiga dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2030.

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Prioritas Pembangunan secara Umum (General Priority)	Membangun landasan regulasi, data, dan sarana prasarana dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan kinerja utama dan kinerja kunci untuk pemenuhan target jangka menengah.	Diversifikasi dan pemanfaatan pelaksanaan urusan perhubungan	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target Renstra; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi.

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan konektivitas infrastruktur kewilayahan	Manajemen transportasi: Pemetaan simpul transportasi	Manajemen transportasi: Penetapan rencana induk jaringan LLAJ	Manajemen transportasi: Integrasi rencana antar moda & penguatan akses daerah terpencil	Manajemen transportasi : Penyelarasan transportasi dengan kawasan agroindustri	Manajemen transportasi : Evaluasi capaian sektor transportasi	Tahun 2030 menjadi tahapan konsolidasi dan penyesuaian arah pembangunan konektivitas infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada keterhubungan wilayah, tetapi juga pada keunggulan lingkungan dan ketahanan wilayah. Pemerintah daerah akan mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ekologis, efisiensi energi, dan adaptif terhadap perubahan iklim, sejalan dengan transformasi menuju alam, lingkungan dan infrastruktur unggul.
	Transportasi darat: Pemetaan trayek, terminal, dan perlengkapan jalan, rehabilitasi terminal tipe c	Transportasi darat: Rehabilitasi perlengkapan jalan & pengaturan trayek	Transportasi darat: pemenuhan pelayanan trayek ke daerah yang belum terlayani trayek angkutan umum	Transportasi darat: Integrasi simpul terminal dengan pusat ekonomi khususnya agroindustri	Transportasi darat: Digitalisasi manajemen terminal dan trayek	
	Transportasi sungai atau danau: Identifikasi lintas penyeberangan potensial	Transportasi sungai atau danau: Pengembangan dan revitalisasi dermaga atau pelabuhan pengumpan lokal	Transportasi sungai atau danau: Penambahan rute layanan	Transportasi sungai atau danau: Dukungan transportasi sungai untuk ekonomi lokal	Transportasi sungai atau danau: Evaluasi pelayanan lintas dan pelayanan kapal	

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
1. penyelenggaraan transportasi yang bertujuan menjamin kelancaran, keselamatan, keterjangkauan, dan konektivitas pergerakan orang dan barang antar wilayah melalui berbagai moda secara terpadu	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Penataan Infrastruktur Perhubungan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan LLAJ dan Pengelolaan Pelayaran
2. Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/subkegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasiona- lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. penyelenggar aan transportasi yang bertujuan menjamin kelancaran, keselamatan, keterjangkau an, dan konektivitas pergerakan orang dan barang antar wilayah melalui berbagai moda secara terpadu.	Meningkatn ya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Penataan Infrastruktur Perhubungan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan LLAJ dan Pengelolaan Pelayaran	Menyediakan prasarana perhubungan yang sesuai standar teknis	Peningkatan jalan kabupaten, revitalisasi pelabuhan laut
			Memastikan ketersediaan sarana transportasi yang laik jalan (angkutan penumpang/bara ng)	Konsolidasi trayek transportasi umum antar kecamatan
			Mengoptimalkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Melaksanakan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	
			Menyediakan Rancangan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam	

Operasiona- lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kabupaten Sumbawa	
			Memfasilitasi Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten	
			Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	
			Memfasilitasi Penerbitan izin usaha angkutan sungai dan danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
			Melaksanakan Pembangunan, Fasilitasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Penguatan forum LLAJ	
2. Tata Kelola manaje-men internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatn ya Kualitas Penyelengga raan Layanan Dinas Perhubunga n	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah	Penguatan pe- ngelolaan sistem informasi kinerja dan SOP	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis OPD
				Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap OPD
				Implementasi reward & punishment berbasis kinerja
				Penetapan standar layanan sektor (pendidi-kan, kesehatan, dsb.).

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KENERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*.

Cascading tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah					Rasio Konektivitas	
		Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut				Persentase ketersediaan prasarana transportasi darat	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan LLAJ			Konektivitas Darat	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala		Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersusunnya dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disusun	2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
					Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
					Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.14.0003 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.2.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.2.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
					Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
					Tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
					Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
					Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Diterbitkannya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
						Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Disusun	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
					Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
					Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.06.0006 Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
					Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
					Tersedianya Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Persentase ketersediaan prasarana transportasi laut	
					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayaran	Konektivitas Laut	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran
					Tersedianya Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
					Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.03.2.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Tersedianya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.15.03.2.07.0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pelayaran (dermaga, tambatan perahu, pelabuhan pengumpan lokal)	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran
					Terlaksananya Pembangunan serta tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan serta Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
					Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2.15.03.2.12.0002 Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
					Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
					Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Dinas Perhubungan	Kategori AKIP Dinas Perhubungan	
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	2.15.01 Program Penunjang Urusan Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Tersediannya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Tersedianya dokumen administrasi keuangan Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Tersedianya dokumen administrasi umum Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dinas Perhubungan	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	
					Meningkatnya profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	IP-ASN Dinas Perhubungan	2.15.01 Program Penunjang Urusan Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kapasitas ASN Dinas Perhubungan	Jumlah ASN Dinas Perhubungan yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas	2.15.01.2.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	
			Meningkatnya retribusi daerah sektor perhubungan			Laju realisasi retribusi daerah sektor perhubungan	2.15.01 Program Penunjang Urusan Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan yang disusun	2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil cascading tujuan, sasaran, dan outcome dapat disusun program sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan keteraturan lalu lintas serta efisiensi angkutan jalan. Program ini mencakup kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR), audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas, penerbitan izin trayek, penetapan tarif kelas ekonomi, penyelenggaraan parkir, penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (seperti rambu dan APILL), pengelolaan terminal tipe C, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, program ini juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelayanan berbasis digital guna mendukung sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), terutama pada wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses darat. Kegiatan utama program ini meliputi penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam wilayah kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. Selain itu, program ini mencakup penyediaan fasilitas pendukung dermaga dan pelabuhan pengumpan lokal. Melalui program ini, diharapkan terwujud konektivitas antarpulau yang aman, teratur, dan mendukung aktivitas ekonomi serta pelayanan publik di wilayah pesisir dan kepulauan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah (Dinas Perhubungan) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta IKU dan IKD/IKK pada urusan yang diampuh (urusan perhubungan), maka uraian kegiatan disajikan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<u>Nama Kegiatan:</u> Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk memastikan kelayakan teknis dan keselamatan kendaraan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> UPPKB (Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pemilik/pengusaha kendaraan, kepolisian RI. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjamin keselamatan pengguna jalan melalui kendaraan yang laik jalan serta

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			mengurangi kecelakaan lalu lintas. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan melalui prosedur uji teknis sesuai peraturan perundangan dengan pengawasan dan pelaporan berbasis sistem.
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<u>Nama Kegiatan:</u> Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di jalan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Seluruh ruas jalan di Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin selama tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, Kepolisian RI, dan masyarakat. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Mengidentifikasi dan mitigasi risiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Melalui pengamanan dan pengaturan lalu lintas, giat operasi terhadap pengemudi kendaraan penumpang orang atau barang yang melanggar ketentuan yang berlaku seperti ODOL (Over Dimention Over Load) dan tidak memenuhi standar teknis laik jalan kendaraan bermotor.
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin selama tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pengusaha angkutan umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha angkutan umum. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan melalui proses permohonan, verifikasi administrasi dan teknis, serta penerbitan rekomendasi izin dari Dinas Perhubungan yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat standar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diterbitkan izin oleh Dinas Perhubungan.
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, dll) di jalan Kabupaten.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Seluruh jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin selama tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pihak ketiga (konsultan dan kontraktor) <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Perencanaan berdasarkan kebutuhan lapangan, pengadaan perlengkapan jalan, pemasangan dan evaluasi efektivitas.
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<u>Nama Kegiatan:</u> Pengelolaan dan layanan di terminal penumpang tipe C <u>Lokasi Kegiatan:</u> Terminal tipe C di Kabupaten Sumbawa (Terminal Empang) <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin selama tahun 2025-2029 <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pihak ketiga (konsultan dan kontraktor) <u>Manfaat Kegiatan:</u> Mewujudkan terminal yang nyaman, tertib, dan aman bagi Masyarakat. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Meliputi penataan ruang, pengawasan operasional, pelayanan informasi, dan pemeliharaan fasilitas.
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<u>Nama Kegiatan:</u> Penerbitan izin Pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin selama tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, juru parkir, dan Masyarakat. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan tata Kelola parkir yang legal, tertib, dan mengurangi kemacetan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Melalui proses perizinan, peninjauan lokasi, dan pengawasan operasional.
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun 2027-2028. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, Bappeda, akademisi.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjadi dasar perencanaan dan pengembangan sistem transportasi daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilakukan melalui kajian teknis, pengumpulan data, konsultasi publik, dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten.
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Ruas jalan kabupaten di Wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan secara rutin setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, masyarakat. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Mengoptimalkan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Melalui pengaturan arus lalu lintas, dan penilaian pemenuhan sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Persetujuan hasil studi Andalalin untuk Pembangunan yang berdampak pada lalu lintas di jalan kabupaten. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kawasan Pembangunan (perumahan, pusat perbelanjaan, tamabang. Dll) pada jalan kabupaten di Wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Setiap ada pengajuan studi Andalalin. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pengembang, konsultan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Mengendalikan dampak lalu lintas dari Pembangunan dan menjaga kelancaran mobilitas. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Evaluasi dokumen Andalalin, kunjungan lapangan, dan penerbitan persetujuan teknis.
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi untuk trayek dalam daerah kabupaten. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Trayek dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan setiap ada penyesuaian tarif. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, Organda, pelaku usaha angkutan, masyarakat. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjamin tarif yang adil bagi pengguna

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			dan pelaku usaha angkutan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Melalui kajian biaya operasional, survei, uji public, dan penetapan Keputusan tarif.
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	<u>Nama Kegiatan:</u> Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan Sungai dan danau bagi WNI perseorangan atau badan usaha yang berdomisili di Kabupaten Sumbawa. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan sesuai dengan pengajuan izin pada periode 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pelaku usaha angkutan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Memberikan legalitas usaha angkutan perairan, meningkatkan pelayanan transportasi perairan, dan menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Melalui pengajuan dokumen permohonan, verifikasi administrasi dan teknis, peninjauan lapangan, dan penerbitan izin.
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Wilayah lintas penyeberangan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Sesuai kebutuhan dan pengajuan pada rentang waktu 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pemilik kapal. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjamin keteraturan operasional kapal, keselamatan pelayaran. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Penetapan melalui kajian lintas, pemetaan kebutuhan, evaluasi teknis kapal, dan penerbitan persetujuan operasi.
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<u>Nama Kegiatan:</u> Fasilitasi Pembangunan dan penerbitan izin Pembangunan serta pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dilaksanakan bertahap selama periode 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Perhubungan, pemerintah desa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan akses logistik, mendukung angkutan laut lokal. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Melalui studi kelayakan, perizinan teknis dan lingkungan, pembangunan fisik, serta evaluasi operasional.
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan setiap tahun. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Perhubungan.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Perhubungan.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Perhubungan.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/ Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Perhubungan.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Perhubungan.
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi kepegawaian daerah meliputi monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, serta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan para pegawai agar dapat bekerja optimal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi teknis masing-masing. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Perhubungan dan eksternal, yaitu instansi pembina penyelenggara pendidikan dan pelatihan sesuai tusi pegawai yang akan mengikuti diklat.
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan bagian dari administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yang mencakup pencatatan, pelaporan, pengelolaan, serta monitoring terhadap sumber-sumber pendapatan sah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan. Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat untuk memastikan pengelolaan pendapatan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan melalui sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan aplikasi keuangan daerah (SIPD) dengan dukungan pelaporan dan audit internal serta koordinasi dengan BKAD dan Bappenda Kabupaten Sumbawa.

4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan

IKD/IKK Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, maka uraian subkegiatan disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)
1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 8. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 10.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
5	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	11. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 12. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
6	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	13.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
7	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14.Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 15.Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
8	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16.Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 17.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 18.Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
9	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau	20.Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan

No	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)
	Badan Usaha	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 21.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
11	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	23.Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal 24.Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	26.Penyusunan Dokumen Perencanaan PD 27.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 28.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 29.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 30.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 31.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.Evaluasi Kinerja PD
14	Administrasi Keuangan PD	33.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 36.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 37.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
15	Administrasi Umum PD	38.Penyediaan Komponen Instalasi Linstrik/Penerangan Bangunan Kantor 39.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	42.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	46.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

No	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)
		50. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 51. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
19	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	52. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.2. Subkegiatan yang diampuh oleh Dinas Perhubungan pada Tabel 4.3 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan untuk diampuh oleh Dinas Perhubungan pada Tabel 4.2 di atas, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah dan entitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Perangkat Daerah (internal) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Sebagian subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029, sebagian lagi dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan berbagai subkegiatan urusan pemerintahan wajib melibatkan berbagai pihak sebagai berikut: Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), Pemerintah Provinsi NTB, pelaku usaha angkutan umum, Organda. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat Subkegiatan

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menjamin keselamatan pengguna jalan melalui kendaraan yang laik jalan serta mengurangi kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengidentifikasi dan mitigasi risiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas.
- c. Memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha angkutan umum.

- d. Meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
- e. Mewujudkan terminal yang nyaman, tertib, dan aman bagi Masyarakat.
- f. Menjadi dasar perencanaan dan pengembangan sistem transportasi daerah.
- g. Mengoptimalkan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
- h. Mengendalikan dampak lalu lintas dari Pembangunan dan menjaga kelancaran mobilitas.
- i. Memperluas layanan transportasi ke desa dan meningkatkan konektivitas wilayah.
- j. Menyediakan data tarif sehingga dapat diketahui pengguna dan pelaku usaha angkutan umum.
- k. Memberikan legalitas usaha angkutan perairan, meningkatkan pelayanan transportasi perairan, dan menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
- l. Menjamin keteraturan operasional kapal, keselamatan pelayaran.
- m. Meningkatkan akses logistik, mendukung angkutan laut lokal.
- n. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- o. Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- q. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- r. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- s. Terjaganya fungsi dan kinerja BMD.
- t. Mendukung tata kelola administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- u. Memastikan akuntabilitas, transparansi, dan sebagai dasar evaluasi, pengawasan, serta perencanaan target retribusi tahun berikutnya.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan/atau dapat dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya meliputi: Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), Pemerintah Provinsi NTB, pelaku usaha angkutan umum, dan Organisasi.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan tansisi tahun 2030 disajikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Program/Kegiatan/Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030

	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Dinas Perhubungan																
	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	%	65,10	65,50	1.396.980.000	66,20	803.301.389	66,90	855.691.927	67,60	920.369.940	68,30	999.984.052	69	1.098.506.126
	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	%	54,37	100	127.745.000	100	137.604.529	100	146.525.062	100	157.731.893	100	171.301.550	100	188.198.398
	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	1	100.295.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-
	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	3707	5614	27.450.000	5664	35.072.420	5714	37.297.606	5764	40.268.688	5814	43.666.031	5864	47.990.780
	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	N/A	N/A	-	5664	73.532.109	5714	78.333.756	5764	84.240.121	5814	91.535.315	5864	100.551.544
	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	N/A	N/A	-	6	29.000.000	6	30.893.700	6	33.223.085	6	36.100.204	6	39.656.074
	2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disusun	Dokumen	1	1	1.268.420.000	1	664.819.920	1	708.232.661	1	761.633.403	1	827.590.856	1	909.108.555
	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1.268.420.000	1	664.819.920	1	708.232.661	1	761.633.403	1	827.590.856	1	909.108.555
	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	Dokumen	24	64	815.000	64	876.940	64	934.204	64	1.004.643	64	1.091.645	64	1.199.172
	2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	24	64	815.000	64	876.940	64	934.204	64	1.004.643	64	1.091.645	64	1.199.172
	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	%	12,15	12,80	1.313.654.000	20	2.503.491.704	40	2.166.969.712	60	2.868.059.230	80	3.116.433.159	100	3.423.401.826
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan	Unit	13	25	299.518.000	200	1.412.281.368	200	1.504.503.341	200	2.155.642.895	200	2.342.321.569	200	2.573.040.244

			BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			2.15.2.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	N/A	N/A	-	100	683.977.774	100	728.641.522	100	1.052.431.095	100	1.143.571.627	100	1.256.213.433
			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	13	25	258.323.000	100	683.977.774	100	728.641.523	100	1.052.431.094	100	1.143.571.628	100	1.256.213.433
			2.15.2.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	N/A	N/A	-	1	22.162.910	1	23.610.148	1	25.390.353	1	27.589.157	1	30.306.689
			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	2	41.195.000	1	22.162.910	1	23.610.148	1	25.390.353	1	27.589.157	1	30.306.689
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia	%	68,18	73	760.846.000	77	818.670.296	81	372.129.466	85	400.188.028	89	434.844.311	93	477.676.476
			2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-
			2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	1	760.846.000	1	818.670.296	1	372.129.466	1	400.188.028	1	434.844.311	1	477.676.476
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Laporan	1	1	253.290.000	1	272.540.040	1	290.336.905	1	312.228.307	1	339.267.279	1	372.685.106
			2.15.02.2.04.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	253.290.000	1	272.540.040	1	290.336.905	1	312.228.307	1	339.267.279	1	372.685.106
			2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	28,13	35,94	405.553.000	43,75	46.375.028	51,56	549.403.317	59,38	53.128.327	67,19	57.729.240	75,00	63.415.570
			2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Disusun	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A	-	1	500.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-
			2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A		1	400.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-
			2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A		1	100.000.000	N/A		N/A	-	N/A	-

				BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	N/A	-	1	10.000.000	1	10.653.000	1	11.456.236	1	12.448.346	1	13.674.508	
			2.15.02.2.06.0006 Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	N/A	N/A	-	5	5.000.000	5	5.653.000	5	6.456.236	5	7.448.346	5	8.674.508
			2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	N/A	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
			2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	N/A	N/A	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
		2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	Dokumen	1	1	405.553.000	1	36.375.028	1	38.750.317	1	41.672.091	1	45.280.894	1	49.741.062	
			2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	405.553.000	1	36.375.028	1	38.750.317	1	41.672.091	1	45.280.894	1	49.741.062
		2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran			Konektivitas Laut	%	25,2	25,5	95.555.000	25,8	95.555.000	26,1	96.805.000	26,4	132.117.501	26,7	142.508.126	27,0	188.843.402	
		2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dokumen	N/A	N/A	-	1	5.555.000	1	6.499.678	1	7.680.527	1	9.156.587	1	10.598.657	
			2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	N/A	N/A		1	3.555.000	1	4.499.678	1	5.680.527	1	7.156.587	1	8.598.657

			BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	N/A	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
			2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Dokumen	1	1	95.555.000	1	90.000.000	1	90.305.322	1	124.436.974	1	133.351.539	1	178.244.745
			2.15.03.2.07.0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	95.555.000	1	90.000.000	1	90.305.322	1	124.436.974	1	133.351.539	1	178.244.745
	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran			Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pelayaran (dermaga, tambatan perahu, pelabuhan pengumpan lokal)	%	83	83	-	83	-	92	15.000.000	92	-	100	15.000.000	100	-
			2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan serta Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	1	15.000.000	N/A	-	1	15.000.000	N/A	-
			2.15.03.2.12.0002 Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	1	10.000.000	N/A	-	1	10.000.000	N/A	-
			2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	2.500.000	N/A		N/A	2.500.000	N/A	-
			2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	2.500.000	N/A		N/A	2.500.000	N/A	-
	2.15.01 Program Penunjang Urusan Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota			Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	68,16	71,16	4.736.855.528	74,16	5.000.260.212	77,16	5.345.153.022	80,16	5.721.675.760	83,16	6.134.827.314	86,16	6.588.931.800
			2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	Dokumen	7	7	33.056.100	7	34.877.378	7	37.158.769	7	39.998.715	7	42.933.186	7	46.237.507
			2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	17.139.600	1	18.024.987	1	19.143.564	1	20.715.239	1	22.257.444	1	24.031.760
			2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.182.000	1	2.310.302	1	2.469.712	1	2.643.580	1	2.834.447	1	3.044.196

			BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.471.000	1	1.557.495	1	1.664.962	1	1.782.175	1	1.910.848	1	2.052.251
			2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	2.984.000	1	3.159.459	1	3.377.462	1	3.615.235	1	3.876.255	1	4.163.098
			2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.404.000	1	2.545.355	1	2.720.985	1	2.912.542	1	3.122.828	1	3.353.917
			2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	1.348.500	2	1.427.792	2	1.526.309	2	1.633.762	2	1.751.719	2	1.881.346
			2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	1	1	5.527.000	1	5.851.988	1	6.255.775	1	6.696.181	1	7.179.646	1	7.710.939
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Dokumen	4	6	4.253.350.528	6	4.498.447.539	6	4.808.840.419	6	5.147.382.785	6	5.519.023.822	6	5.927.431.585
			2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39	50	4.131.362.528	52	4.374.286.645	54	4.676.112.423	56	5.005.310.738	58	5.366.694.173	60	5.763.829.542
			2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	316	350	116.033.000	350	117.855.740	350	125.987.786	350	134.857.327	350	144.594.026	350	155.293.984
			2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	2.175.000	1	2.302.890	1	2.461.789	1	2.635.099	1	2.825.354	1	3.034.430
			2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.750.000	1	1.852.900	1	1.980.750	1	2.120.195	1	2.273.273	1	2.441.495
			2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	3	3	2.030.000	3	2.149.364	3	2.297.670	3	2.459.426	3	2.636.997	3	2.832.134
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Dokumen	3	4	184.623.050	4	185.478.885	4	198.276.929	4	212.235.624	4	227.559.036	4	244.398.405
			2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	951.750	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-
			2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	48.464.300	2	52.321.714	2	55.931.912	2	59.869.519	2	64.192.098	2	68.942.313
			2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	134.405.000	24	132.308.014	24	141.437.267	24	151.394.451	24	162.325.130	24	174.337.190

			BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	6	802.000	6	849.158	6	907.749	6	971.655	6	1.041.809	6	1.118.902
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	Dokumen	3	4	157.404.500	4	166.659.885	4	178.159.417	4	190.701.840	4	204.470.512	4	219.601.330
			2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	53.897.000	1	57.066.144	1	61.003.708	1	65.298.369	1	70.012.911	1	75.193.866
			2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	38.100.000	1	40.340.280	1	43.123.759	1	46.159.672	1	49.492.400	1	53.154.838
			2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.342.500	1	2.480.239	1	2.651.375	1	2.838.032	1	3.042.938	1	3.268.116
			2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	63.065.000	1	66.773.222	1	71.380.574	1	76.405.767	1	81.922.263	1	87.984.511
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Dokumen	1	1	108.421.350	1	114.796.525	1	122.717.488	1	131.356.797	1	140.840.757	1	151.262.973
			2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	6.300.000	10	6.670.440	10	7.130.700	10	7.632.702	10	8.183.783	10	8.789.383
			2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	102.121.350	4	108.126.085	4	65.586.788	4	123.724.095	4	132.656.975	4	142.473.591
			2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	1	50.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-
			2.15.01 Program Penunjang Urusan Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota	IP-ASN Dinas Perhubungan	Poin	73.95	75	-	77	10.000.000	79	10.690.000	81	11.442.576	83	12.268.730	85	13.176.616
			2.15.01.2.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN Dinas Perhubungan yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	Orang	N/A	N/A	-	2	10.000.000	2	10.690.000	2	11.442.576	2	12.268.730	2	13.176.616
			2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	N/A	-	1	10.000.000	1	10.690.000	1	11.442.576	1	12.268.730	1	13.176.616
			2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	N/A	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

				BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
								2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-			
	2.15.01 Program Penunjang Urusan Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota			Laju realisasi retribusi daerah sektor perhubungan	%	-43.56	5	-	5	5.000.000	5	5.345.000	5	5.721.288	5	6.134.365	5	6.588.308	
		2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan yang disusun	Dokumen	N/A	N/A	-	1	5.000.000	1	5.345.000	1	5.721.288	1	6.134.365	1	6.588.308	
			2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	N/A	N/A	-	1	5.000.000	1	5.345.000	1	5.721.288	1	6.134.365	1	6.588.308	
JUMLAH								7.948.597.528		8.463.983.333		9.045.057.977		9.712.514.622		10.484.884.986		11.382.863.649	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Subkegiatan yang mendukung program prioritas yang sudah diintegrasikan ke dalam program perangkat daerah, disajikan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan LLAJ	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Ditujukan untuk menyediakan simpul transportasi darat yang representatif, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta berfungsi sebagai pusat layanan angkutan umum antar kecamatan dan desa. Dengan pengelolaan yang profesional dan pelayanan yang baik, terminal ini menjadi sumber PAD strategis dari retribusi parkir dan retribusi pemakaian ruangan (toilet)	Prioritas Pendukung Intensifikasi PAD
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Prioritas Pendukung Intensifikasi PAD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk menata sistem perparkiran yang tertib dan legal. Dengan pengawasan yang baik, kebijakan ini akan mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan dari sektor perparkiran.	Prioritas Pendukung Intensifikasi PAD
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan kabupaten	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan kabupaten	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Ditujukan untuk memastikan fungsi prasarana jalan tetap optimal dan sesuai standar	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Ditujukan untuk memastikan fungsi perlengkapan jalan tetap optimal dan sesuai standar	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
		Pengujian Berkala Kendaraan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Ditujukan untuk memastikan kendaraan	Prioritas Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	angkutan barang dan penumpang dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mendukung kelancaran distribusi logistik, menjamin keselamatan transportasi, serta mengurangi risiko kerusakan yang dapat menghambat operasional.	Perdagangan dan Usaha Lancar
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan meningkatkan standar keselamatan lalu lintas sehingga proses distribusi logistik dapat berlangsung dengan lancar, serta mengurangi risiko kecelakaan yang dapat mengganggu operasional. Hal ini turut mendukung efisiensi waktu dan biaya transportasi, menciptakan kepastian dalam pengiriman, serta memperkuat daya saing pelaku usaha secara umum.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk menyediakan arah dan dasar perencanaan pengembangan sistem transportasi jalan yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Ditujukan untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara angkutan umum telah menerapkan standar keselamatan secara menyeluruh dalam operasionalnya.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara instansi yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, lancar, dan efisien.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditujukan untuk menjamin transparansi, kepastian, dan keterjangkauan biaya transportasi bagi masyarakat.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ditujukan untuk mengatur dan memastikan pelaku usaha yang berdomisili di wilayah setempat menjalankan operasional angkutan secara legal, aman, dan tertib.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah	Ditujukan untuk mengatur jalur transportasi pelayaran yang aman, efisien, dan teratur di wilayah kabupaten	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kabupaten/Kota		
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Ditujukan untuk memperkuat jaringan transportasi laut di tingkat kabupaten dengan menyediakan fasilitas yang memadai	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan lokal	Ditujukan untuk memastikan fasilitas pelabuhan tetap berfungsi secara optimal, aman, dan nyaman bagi aktivitas bongkar muat serta mobilitas penumpang dan barang.	Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal		Prioritas Pendukung Perdagangan dan Usaha Lancar

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PD	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	%	19,72	20,24	35	50	65	80	100
2	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	83	83	83	92	92	100	100
3	Kategori Predikat Hasil evaluasi AKIP Dinas	Kategori	B	BB	BB	BB	A	A	A

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PD	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perhubungan								
4	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	-43.56	5	5	5	5	5	5

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024, Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI PD	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Konektivitas Darat	%	65,10	65,50	66,20	66,90	67,60	68,30	69,00
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	%	12,15	12,80	20,00	40,00	60,00	80,00	100
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	28,13	35,94	43,75	51,56	59,38	67,19	75,00
4	Konektivitas Laut	%	25,20	25,50	25,80	26,10	26,40	26,70	27,00
5	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pelayaran (dermaga, tambatan perahu, pelabuhan pengumpan lokal)	%	83	83	83	92	92	100	100
6	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	68,16	71,16	74,16	77,16	80,16	83,16	86,16
7	IP-ASN Dinas Perhubungan	Poin	73.95	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
8	Laju realisasi retribusi daerah sektor perhubungan	%	-43.56	5	5	5	5	5	5

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029. Dua program utama yang menjadi fokus adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan keselamatan, keteraturan, dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan, dan diharapkan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2025-2029 disusun sesuai amanat perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan/sub kegiatan yang dirumuskan, diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Mekanisme ini mencakup:

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahun, baik dari aspek fisik maupun keuangan.
2. Evaluasi Kinerja Akhir Renstra, untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi periode perencanaan selanjutnya.
3. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai bagian dari sistem evaluasi kinerja berbasis hasil, yang digunakan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan.

